

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama dalam pelaksanaannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana terjadinya perubahan struktur perekonomian atau terjadinya peningkatan pendapatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah, sehingga akan meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi selain ketersediaan sumber daya, modal, teknologi, energy, *intrepreneurship* dan bahan baku juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi khususnya politik dan sosial. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga dapat sebagai landasan untuk pemerintah dalam menentukan arah kebijakan kedepan.

Kebijakan dalam pembangunan disuatu wilayah merupakan tugas, keputusan dan intervensi dari pemerintah pusat atau daerah. Berdasarkan undang-undang daerah No. 9 Tahun 2015 (pasal 1 ayat 6) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan urusan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut, yang memberikan kewenangan

dan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengatur dan mengelola seluruh penerimaan dan pengeluaran suatu daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), diharapkan pemerintah mampu dengan cermat mengembangkan dan menggali potensi daerahnya masing-masing untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, akan berdampak pula pada perekonomian nasional begitu pula sebaliknya. Berikut perbandingan laju pertumbuhan ekonomi provinsi se-sulawesi dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia:

Tabel 1.1

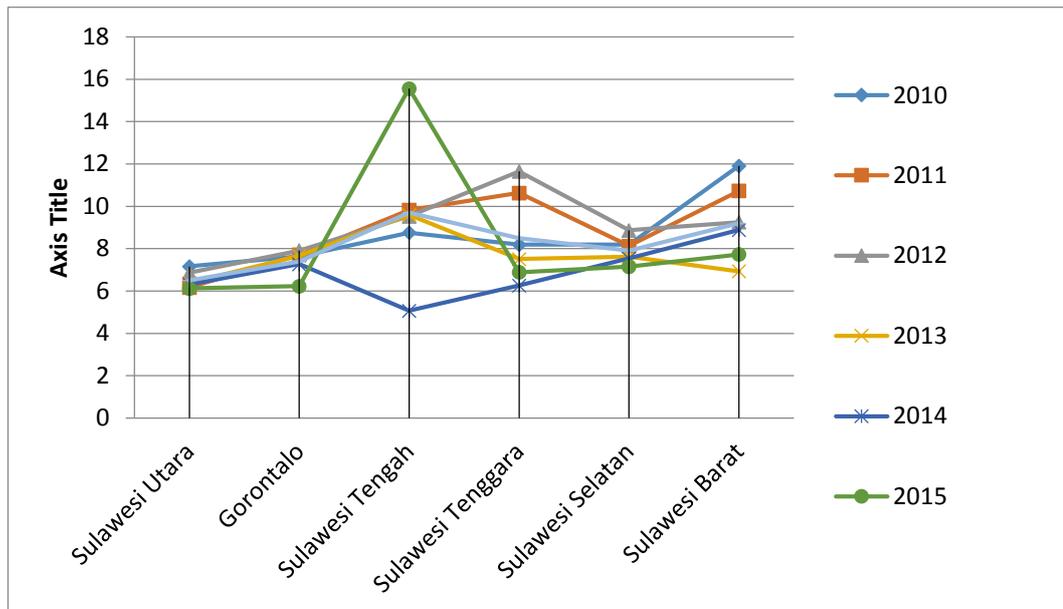
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sulawesi dan Indonesia
menurut ADHK (%) tahun 2010-2015**

Provinsi	TAHUN						Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Sulawesi Utara	7,16	6,17	6,86	6,38	6,31	6,12	6,5
Gorontalo	7,63	7,71	7,91	7,67	7,27	6,23	7,4
Sulawesi Tengah	8,75	9,82	9,53	9,59	5,07	15,56	9,7
Sulawesi Tenggara	8,19	10,63	11,65	7,51	6,26	6,88	8,5
Sulawesi Selatan	8,19	8,13	8,87	7,62	7,54	7,15	7,9
sulawesi Barat	11,91	10,73	9,25	6,93	8,88	7,73	9,2
Indonesia	6,22	6,49	6,26	5,73	5,06	4,79	5,7

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sulawesi dan Indonesia menurut ADHK (%) tahun 2010-2015



Sumber data: Badan Pusat Statistik

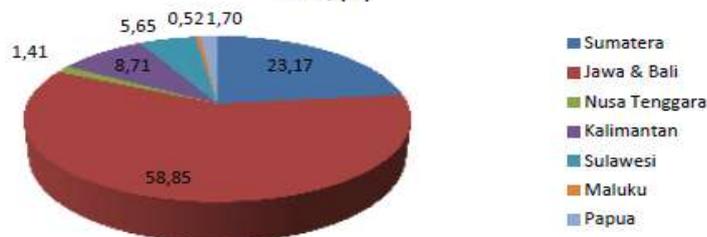
Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa, laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia terus melemah dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Faktor yang menjadi hambatan atau penyebab menurunnya perekonomian indonesia adalah dengan menurunnya harga-harga ekspor komoditas utama dikarenakan lemahnya permintaan dan turunnya harga komoditas dunia dan juga lemahnya kinerja beberapa komponen pemerintah domestik seperti konsumsi pemerintah dan investasi pada sektor bangunan yang menyebabkan kurangnya investasi asing dalam negeri. (World Bank,2015).

Lemahnya perekonomian nasional juga terjadi pada perekonomian di Provinsi Se-Sulawesi dalam periode 2010-2015, meskipun secara umum tumbuh positif namun cenderung berfluktuatif atau melambat. Di lihat dari perbandingan antar provinsi Se-Sulawesi, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah yang paling rendah sebesar 6,5%, berbeda jauh dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 9,7% tertinggi diantara provinsi lainya di Pulau Sulawesi, yang di ikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 9,2% menempati posisi ke-dua kemudian posisi ke-tiga di tempati oleh Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 8.5% dan posisi ke-empat di tempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,9%, serta posisi ke-lima ditempati oleh Provinsi Gorontalo.

Kemudian terlihat bahwa kontribusi di pulau Sulawesi dalam pembentukan PDB nasional sebesar 5,65% terbesar keempat setelah pulau kalimantan, dengan kontribusi terbesar berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara Kontribusi terbesar perekonomian pada Pulau Sulawesi sebagian besar disumbang dari sektor Pertanian, sektor kontruksi, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Keempat sektor tersebut berkontribusi sekitar 59,51 persen, seperti yang terlihat pada gambar 1.2 berikut:

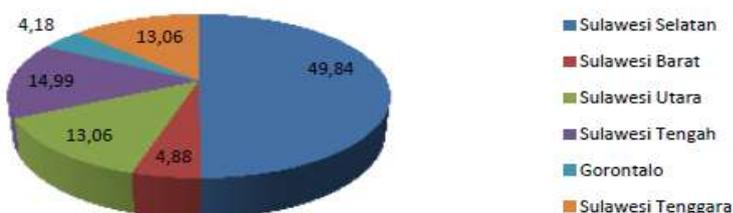
Gambar 1.2

Kontribusi Nilai PDRB ADHB Pulau Terhadap PDB Nasional Tahun 2014, (%)



Peran Sulawesi terhadap PDB nasional sebesar 5,65 persen

Kontribusi Nilai PDRB Provinsi Terhadap PDRB Pulau Tahun 2014, (%)



Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Sulawesi disumbang dari Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: PDDA, simreg bappenas 2015

Setiap wilayah maupun daerah pasti memiliki tingkat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda. Adanya ketidak seimbangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah disebabkan kegiatan aktivitas perekonomian yang berbeda-beda di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik dan perbedaan ciri khasnya tersendiri meliputi sumber daya alamnya, ekonomi, sosial budaya, mutu sumber daya manusianya, jumlah dan kepadatan penduduk, adat istiadat, serta sarana dan prasarana yang tersedia di setiap daerah juga konsentrasi ekonomi wilayah di masing-masing daerah tersebut. Perbedaan karakteristik tersebutlah yang berpengaruh pada kemampuan tumbuh masing-masing daerah sehingga membuat pembangunan disebagian daerah tumbuh lebih cepat dibanding

daerah lainnya. Kemampuan tumbuh yang berbeda inilah diikuti oleh perbedaan pola pembangunan ekonomi yang kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar wilayah/daerah.

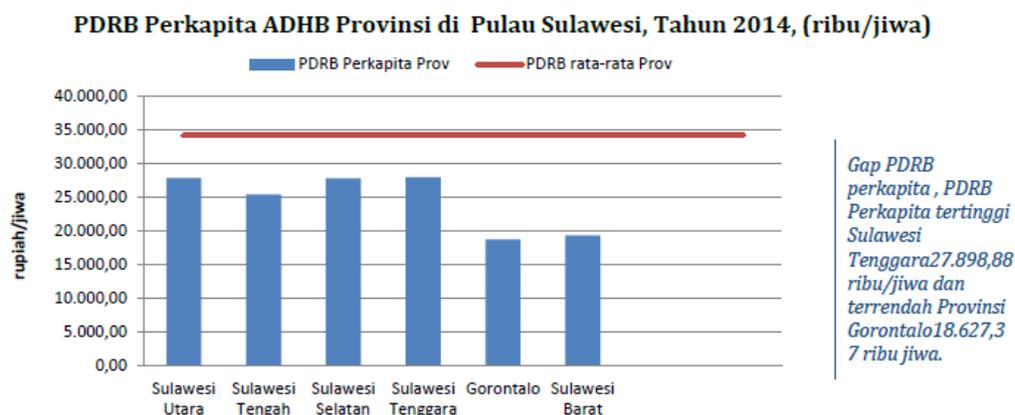
Tabel 1.2

Perkembangan PDRB Perkapita ADHK seri Tahun 2010 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2010-2014, (Rp. ribu/jiwa).

Provinsi	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Sulawesi Utara	22.707,79	23.812,97	25.145,96	26.445,92	27.804,68
Sulawesi Tengah	19.558,33	21.105,70	22.724,47	24.481,12	25.316,32
Sulawesi Selatan	21.306,72	22.769,19	24.507,47	26.086,94	27.760,65
Sulawesi Tenggara	21.573,11	23.338,67	25.489,79	26.817,47	27.898,88
Gorontalo	14.811,95	15.687,65	16.650,27	17.640,56	18.627,37
Sulawesi Barat	14.755,47	16.023,45	17.169,66	18.010,31	19.211,14
Rata-rata Perkapita 33 Prov	28.778,17	30.112,57	31.519,93	32.874,76	34.127,72

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Provinsi 2010-2014, BPS

Gambar 1.3



Sumber: BPS, sakernas tahun 2014

Berdasarkan data yang ada dalam tabel 1.2 dan gambar 1.3 menunjukkan bahwa perbandingan PDRB perkapita antar provinsi di pulau

Sulawesi pada tahun 2014, menunjukkan adanya gap (ketimpangan) yang cukup tinggi antar wilayah, dimana PDRB perkapita tertinggi mencapai Rp.27.898,88 ribu per jiwa di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan terendah sebesar 18.627,37 ribu per jiwa di Provinsi Gorontalo tahun 2014. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di setiap wilayah atau daerah pasti memiliki potensi dan masalah ekonomi yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang menjadi perhatian penuh pemerintah untuk lebih cermat dalam mengelola daerahnya dan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini penentuan besaran pengeluaran pemerintah daerah juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja perekonomian di daerah. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Model pertumbuhan endogen (Barro, 1990) juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang produktif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan. Salah

satu pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal berupa penyediaan infrastruktur seperti listrik, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan sejumlah infrastruktur di daerah akan mendorong berkembangnya investasi swasta dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Namun di provinsi se-sulawesi periode 2010-2015 belanja pemerintah cenderung lebih tinggi oleh belanja barang dan jasa di banding dengan belanja modal (lihat halaman lampiran) berbeda dengan provinsi Sulawesi Tenggara terlihat bahwa belanja modal yang lebih tinggi dibanding dengan belanja barang jasa. Untuk lebih mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, seharusnya belanja modal lebih ditingkatkan, yaitu belanja yang memiliki nilai manfaat penambahan asset tetap ini sangat efektif di banding dengan belanja barang dan jasa atau belanja lainnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik membuat penelitian ini untuk menganalisis atau mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah daerah dalam alokasi belanja modal dengan tujuan untuk lebih mendorong peningkatan laju kinerja perekonomian antar wilayah di masing-masing daerah dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sehingga peneliti mengambil judul "**Pengaruh Komponen**

Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi se-Sulawesi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi di provinsi se-sulewesi tumbuh melambat pada periode 2010-2015.
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah pada periode 2010-2015.
3. Terdapat adanya gap (ketimpangan) di Provinsi se-Sulawesi.
4. Belanja pemerintah di provinisi Se-Sulawesi periode 2010-2015 dalam hal belanja barang dan jasa lebih tinggi di banding dengan belanja modal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka peneliti dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian, yaitu: Seberapa besarkah pengaruh komponen belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Se-Sulawesi tahun 2010-2015?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh komponen belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Se-Sulawesi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis: Manfaat sebagai bahan masukan terhadap pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan kedepan.
2. Secara teoritis: Manfaat sebagai informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah perkembangan ilmu ekonomi publik dan pertumbuhan ekonomi.